

## PENYEBARAN INFORMASI STANDARDISASI POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MAKASSAR

### INFORMATION DISSEMINATION ON FUEL DISPENSERS STANDARDIZATION FOR CONSUMER PROTECTION IN THE CITY OF MAKASSAR

*Muh. Zulkarnain,<sup>1</sup> Muh. Nadjib M.,<sup>2</sup> Jeanny Maria Fatimah<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> *Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV (email: mh\_ijul@yahoo.co.id)*

<sup>2</sup> *Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin (email: najibnajib@yahoo.com)*

<sup>3</sup> *Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin (email: jeannymaria@gmail.com)*

#### ABSTRAK

Ketidaktahuan konsumen terhadap informasi standardisasi pompa ukur BBM mengakibatkan konsumen merasa tidak terlindungi dalam membeli BBM di SPBU kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi informasi standardisasi pompa ukur BBM, upaya penyebaran informasi informasi standardisasi pompa ukur BBM yang dilakukan oleh instansi kemetrolagian di kota makassar dan hambatan-hambatan dalam menyebarkan informasi standardisasi pompa ukur BBM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah instansi kemetrolagian dan pengelola SPBU di kota makassar. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi informasi standardisasi pompa ukur BBM dapat diketahui melalui tanda tera dan sertifikat hasil peneraan; plat identitas pompa ukur BBM; Informasi jenis media yang diukur, dan harga satuan/liter; Pompa Ukur BBM terpasang kokoh dan terjamin dan terjamin keamanannya; memiliki nomor pompa sesuai dengan konsol; Jendela penutup tidak pecah atau rusak; gelas penglihat dalam keadaan bersih, berisi bola plastik dan terisi penuh dengan cairan; selang dalam kondisi baik, tidak pecah dan terkelupas; menampilkan semua elemen (eight tes) “888888” sebelum muncul angka 0. Upaya penyebaran informasi standardisasi pompa ukur BBM dilakukan melalui komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Adapun hambatan yang dihadapi dalam menyebarkan informasi adalah keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan anggaran, dan kurangnya upaya untuk mendapatkan informasi standardisasi pompa ukur BBM oleh pengelola SPBU.

Kata Kunci : Penyebaran Informasi, Sandardisasi Pompa Ukur BBM, Perlindungan Konsumen

#### ABSTRACT

*Ignorance of consumers to information on fuel dispensers standardization result consumers feel unprotected in buying fuel at the pump station on Makassar. This research aims to analyze the information existence on fuel dispensers standardization, information dissemination on fuel dispensers standardization efforts undertaken by the metrology institutions in the city of Makassar and obstacles to information dissemination on fuel dispensers standardization. The methods used in this study, is the qualitative approach. The object of this research is Metrology Institution and the manager of pump station in Makassar. This research data obtained through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through the data reduction, the data presentation, and the withdrawal of the conclusion. The result showed the existence of information on fuel dispensers standardization can be known through tera mark and certificate of calibration; identity plate measuring fuel pump; Information measured media types, and the unit price / liter; Measure the fuel pump mounted sturdy and secure and guaranteed security; has a number of pumps in accordance with the console; Window coverings*

*are not broken or damaged; glass visionaries in clean condition, containing plastic balls and filled with liquid; hoses are in good condition, not broken and chipped; display all elements (eight tests) "888888" before showing the number 0. Information dissemination on fuel dispensers standardization made through interpersonal communication, group communication and mass communication. As for the obstacles faced in information dissemination is the limited number of human resources, budget constraints, and lack of effort to get information on fuel dispensers standardization by the manager of the pump station.*

**Keywords:** *Information Dissemination, Fuel Dispensers Standardization, Cunsomer Protection*

## PENDAHULUAN

Meningkatnya kegiatan perekonomian di bidang perdagangan, berdampak pada peningkatan penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di masyarakat. Tidak jarang dijumpai barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan informasi yang tersedia, ini berarti pelaku usaha secara sengaja telah memberikan informasi yang tidak benar mengenai barang kepada konsumen dengan maksud memperoleh keuntungan berlebihan dengan cara mencurangi ukuran, takaran atau timbangan yang menyebabkan konsumen dirugikan. Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Hal ini dikemukakan oleh Edmon Makarim (Barkatullah, 2010).

Transaksi perdagangan bisa terjadi dimana saja, salah satunya berada di Stasiun Pengisian Bahan-bakar Umum (SPBU). Data dari Kementerian Perhubungan tahun 2015 disebutkan khusus Provinsi Sulawesi

Selatan, jumlah kendaraan meningkat 18 persen per tahun. Sementara di Kota Makassar jumlah kendaraan roda 2 meningkat 13-14 persen per tahun dan roda 4 meningkat 8-10 persen per tahun. Jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat mencapai 2,4 juta (1,1 juta roda 2 dan 1,3 juta mobil) lebih tinggi dari jumlah penduduknya sebanyak 1,7 juta jiwa. Tingginya jumlah kendaraan di kota Makassar yang semakin hari semakin meningkat, yang bahkan melebihi dari jumlah penduduk Makassar sendiri menyebabkan transaksi perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan penggunaan alat ukur (pompa ukur) BBM juga semakin meningkat. sehingga semakin tidak standar sebuah pompa ukur BBM semakin banyak konsumen yang dirugikan.

Dalam upaya melindungi konsumen maka instansi kemetrolgian melakukan standarisasi terhadap pompa ukur BBM di Kota Makassar sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang kemetrolgian dan undang-undang perlindungan konsumen. Namun informasi tentang standar pompa ukur itu sendiri masih jarang di diketahui oleh konsumen,

sehingga konsumen masih belum nyaman untuk mengisi BBM di SPBU. Penyebaran informasi standarisasi pompa ukur BBM di kota Makassar merupakan tugas yang diemban oleh Instansi Kemetrolgian, yakni pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat oleh Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV.

Keterbatasan informasi standarisasi pompa ukur BBM menjadi kendala yang banyak dihadapi oleh konsumen, Padahal hak konsumen untuk mendapatkan informasi atau hak tahu konsumen merupakan hak yang paling esensi sebagaimana yang disebut pada pasal 4 huruf c UUPK, hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Menurut Bhutto (2000), Informasi yang benar sebenarnya terkandung dalam pengertian dari perlindungan konsumen yang diartikan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sebagian masyarakat memang ada yang bermasa bodoh untuk menuntut hak-haknya, itu disebabkan karena banyak konsumen yang dicurangi oleh pelaku usaha karena ketiadaan informasi maupun informasi yang kurang transparan.

Banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat, baik melalui media cetak maupun media online terhadap ketidakakuratan pompa ukur BBM di SPBU, menimbulkan permasalahan tentang bagaimana informasi standarisasi pompa ukur BBM, seperti yang dikatakan oleh Ansar (2015), bahwa sejumlah pengendara mengeluhkan meteran pompa bensin di SPBU 74.905.03 kota Maros. Jika warga membeli bensin Rp100 ribu, hanya sekitar 10 sampai 15 detik saja sudah mencapai harga tersebut. "Kita tidak bisa ikuti meteran harganya. Bahkan harganya lompat dari 6 ke 8. Sudah lama saya perhatikan. Ukuran bensin yang masuk ke tangki motor atau mobil pasti berbeda jika kita beli di SPBU lain," kata Yusuf salah seorang warga.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Mulyadi (2014), bahwa meteran SPBU depan pintu satu Unhas dikeluhkan oleh warga. "Mahasiswa Hukum Unhas, Muhammad Almudabbir menjelaskan bahwa SPBU di depan kampus Universitas Hasanuddin, meterannya terlalu cepat sewaktu pengisian bahan bakar terutama bensin. Demikian pula yang diungkapkan Rini, warga jalan bung, menuturkan pengisian bensin di SPBU pintu satu sangat berbeda dari takaran. Dia membandingkan kalau mengisi bensin di SPBU samping STMIK. Perbedaannya itu hampir sepertiga kalau pengisian Rp. 10.000."

Keluhan masyarakat sebagaimana disebutkan sebelumnya mengindikasikan konsumen tidak mengetahui secara pasti informasi tentang standar tidaknya sebuah pompa ukur BBM yang dilakukan oleh instansi kemetrolgian, ketidaktahuan ini mengakibatkan konsumen merasa tidak terlindungi dalam membeli BBM di Kota Makassar.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang upaya instansi kemetrolgian dalam menyebarkan informasi standardisasi pompa ukur BBM untuk perlindungan konsumen di Kota Makassar.

## **METODE**

### ***Lokasi dan Objek Penelitian***

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Instansi Kemetrolgian di kota Makassar dimana fokus penelitian dilakukan pada penera metrologi serta 10 pengelola SPBU di Kota Makassar. 10 SPBU tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan posisi SPBU yang berlokasi di jalan-jalan yang terpantau meningkatnya kebutuhan pergerakan lalu lintas, sehingga kecenderungan konsumen untuk membeli BBM di SPBU tersebut juga meningkat.

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

### ***Sumber Data***

Data primer dalam penelitian bersumber dari informasi yang diberikan oleh para informan melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang terkait dengan penelitian ini, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teknik Observasi, Teknik Wawancara, dan Dokumentasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikatakan Miles & Huberman yang dikutip oleh Pawito (2008), dilakukan dengan menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.

## HASIL

### ***Eksistensi Informasi Standardisasi Pompa Ukur BBM***

Standardisasi pompa ukur BBM menjadi suatu kebutuhan, khususnya bagi pengelola SPBU untuk menerapkan aturan pemerintah sebagai jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian pompa ukur BBM untuk melindungi konsumen.

Informasi tentang standardisasi pompa ukur BBM secara jelas terdapat dalam aturan pemerintah tentang syarat teknis meter arus volumetrik, yang kemudian aturan tersebut dijadikan peduan dalam melakukan standardisasi pompa ukur BBM. Dari aturan tersebut pula eksistensi informasi standardisasi pompa ukur BBM dapat di ketahui oleh masyarakat baik pengelola SPBU maupun konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa eksistensi informasi standardisasi pompa ukur BBM di SPBU kota makassar dapat dilihat secara visual melalui medium pompa ukur BBM itu sendiri berdasarkan aturan pemerintah tentang syarat teknis meter arus volumetrik, yang terdiri dari : (a) Pembubuhan tanda tera pada bagian dalam mesin pompa ukur BBM dan pemberian Sertifikat hasil pengujian tera/tera ulang; (b) Plat yang melekat pada mesin pompa ukur BBM yang berisi informasi merk, tipe, no.seri, pembuat pompa ukur BBM dan nomor

sertifikat persetujuan untuk ijin tipe; (c) Terdapat informasi jenis media yang diukur (dijual), dan harga satuan/liter; (d) Pompa ukur BBM harus terpasang dengan kokoh pada pondasinya dan panel dalam keadaan terjamin keamanannya; (e) Pompa ukur BBM memiliki nomor pompa sesuai dengan konsol; (f) Jendela penutup tidak pecah atau rusak; (g) Gelas penglihat dalam keadaan bersih, berisi bola plastik dan terisi penuh dengan cairan; (h) Selang dalam kondisi baik, tidak pecah dan terkelupas; dan (i) Menampilkan semua elemen (eight tes) “888888” sebelum menampilkan angka nol.

### ***Penyebaran Informasi Standardisasi Pompa Ukur BBM oleh Instansi Kemetrolgian di Kota Makassar***

Standardisasi pompa ukur BBM merupakan salah satu wujud pemberian jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran pada pompa ukur BBM dalam melindungi kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang kemetrolgian. Untuk itu perlu dilakukan penyebaran informasi melalui berbagai macam media, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya standardisasi pompa ukur BBM dalam perlindungan konsumen.

Efektifitas pencapaian tujuan komunikasi ditentukan oleh penggunaan

media sebagai saluran penyampaian pesan secara tepat. Karena itu, salah satu aspek penting dalam kegiatan penyebaran informasi adalah penggunaan media secara selektif. Media tidak hanya berfungsi sebagai wahana penyalur pesan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kompleks. Dengan demikian, pemanfaatan media semestinya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi khalayak.

Dalam kegiatan penyebaran informasi standarisasi pompa ukur BBM oleh Instansi Kemetrolgian di Kota Makassar, berdasarkan temuan di lapangan ada tiga jenis media komunikasi yang di pergunakan oleh penyedia/pemberi informasi : yakni media antar pribadi, media kelompok, dan media massa.

### ***Habatan Penyebaran Informasi Standardisasi Pompa Ukur BBM***

Penyebaran informasi standarisasi pompa ukur BBM di Kota Makassar tidaklah berjalan dengan mudah seperti yang diharapkan. Dari hasil wawancara terhadap informan dalam penelitian ini hambatan dalam penyebaran informasi dalam rangka perlindungan konsumen terdiri dari: (a) Keterbatasan jumlah SDM; (b) Keterbatasan anggaran; dan (c) Kurangnya upaya untuk mendapatkan informasi standarisasi pompa ukur BBM oleh Pengelola SPBU.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi informasi standarisasi pompa ukur BBM pada dasarnya telah di jabarkan pada aturan kemetrolgian tentang persyaratan teknis arus volumetrik. Eksistensi informasi pompa ukur BBM yang disebutkan dalam hasil penelitian merupakan medium yang memiliki karakteristik tersendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa pompa ukur BBM telah terstandarisasi. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Meyrowitz (2009), bahwa *medium theory is “a special type of media study that focuses on such characteristics of each medium and how each medium (or each type of media) is physically, socially, and psychological distinct from other media”*.

*Medium is the message.* McLuhan berasumsi bahwa media lah yang lebih penting dari pada isi pesan yang disampaikan media tersebut. Pesan/informasi yang ada dalam medium yang disebutkan sebelumnya memuat informasi penting, namun kehadiran medium tersebut pada pompa ukur BBM yang sebenarnya jauh lebih penting, bukan lagi mengenai isi pesan. Eksistensi media memang telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia, jauh dari isi pesan yang disampaikan media tersebut.

Instansi kemetrolgian di Kota Makassar baik Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Bidang Metrologi Provinsi Sulawesi Selatan maupun Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV telah melakukan penyebaran informasi (diseminasi) secara variatif, melalui komunikasi antarpribadi (tatap muka), komunikasi kelompok (Seminar dan Bimbingan Teknis), dan media massa (Stiker, Brosur, Radio, Televisi, Koran dan Internet). Komunikasi antarpribadi dilakukan melalui tenaga penera saat pelaksanaan standardisasi pompa ukur BBM dan tenaga pengamat tera pada saat pelaksanaan pengawasan pompa ukur BBM di SPBU di Kota Makassar. Saluran komunikasi ini dianggap lebih mampu dan efektif untuk mempengaruhi dan mempersuasi pengelola SPBU yang menjadi target diseminasi informasi.

Diseminasi informasi melalui komunikasi kelompok oleh instansi kemetrologian diadakan melalui kegiatan bimbingan teknis yang melibatkan pengelola SPBU. Tema kegiatannya terkait undang-undang kemetrologian dan undang-undang perlindungan konsumen. Saluran komunikasi kelompok ini dapat mempercepat sampainya informasi kepada para pengelola SPBU, melalui kelompok tersebut dapat didiskusikan informasi-informasi yang bertujuan untuk memberikan berbagi pengetahuan tentang informasi standardisasi pompa ukur BBM untuk perlindungan konsumen.

Disamping komunikasi antarpribadi dan kelompok, diseminasi informasi juga dilakukan oleh instansi kemetrologian melalui media massa (Stiker, Brosur, televisi, radio, koran dan facebook). Media tersebut efektif untuk menjangkau masyarakat secara luas. Sebagaimana yang disebutkan Cangara (2014), media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Liliweri (2011), bahwa penggunaan komunikasi massa melalui media massa seperti surat kabar, radio atau media-media outdoor seperti baliho tepat jika informasi yang akan disampaikan bersifat pemberitahuan (*to information*), karena sifat dan jenis komunikasi seperti ini yang cepat dan luas sehingga dapat menjangkau audiens dalam jumlah yang besar serta dalam waktu singkat. Akan tetapi ketika informasi yang disampaikan bertujuan mempersuasi (*to persuade*) dan ingin merubah perilaku audiens (*to changes behaviors*), maka jenis komunikasi yang tepat adalah media interpersonal atau antar pribadi.

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh instansi kemetrologian di Kota Makassar tidaklah berjalan dengan yang diinginkan. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa hambatan dalam

kegiatan ini berasal dari informan internal dan informan eksternal yang terdiri dari keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan anggaran, dan kurangnya upaya untuk mendapatkan informasi standarisasi pompa ukur BBM oleh pengelola SPBU.

Tenaga penera yang dimiliki oleh dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Sulawesi Selatan hanya berkisar 17 orang yang melakukan fungsi peneraan dan penyuluhan dan pengamat tera 1 orang yang melakukan fungsi pengawasan, yang membawahi wilayah kemetrolagian di provinsi sulawesi selatan. kurangnya tenaga metrologi dikarenakan kemampuan daerah dalam menerima tenaga kemetrolagian serta kualifikasi yang dibutuhkan seorang penera. Penelitian yang dilakukan oleh Sukeski dkk (2014), menunjukkan Berdasarkan analisis kapasitas Penera dibutuhkan jumlah penera sebanyak 3.444 orang secara nasional. Kondisi saat ini jumlah penera hanya sebesar 787 orang (22,9% dari kebutuhan tenaga penera). Jika tidak ada upaya penambahan jumlah SDM metrologi legal, maka rasio ini akan semakin menurun. Hambatan lain dalam menambah SDM penera adalah karena kesulitan memperoleh SDM yang sesuai dengan kualifikasi metrologi legal (S1 Teknik).

Keterbatasan anggaran merupakan persoalan klasik yang dialami oleh instansi pemerintah dalam menjalankan program-

programnya. Anggaran yang terbatas menimbulkan dampak kurang berkembangnya kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia. Keterbatasan anggaran yang dialami instansi kemetrolagian dalam melakukan penyebaran informasi berdampak pada anggaran pengelola SPBU, disebabkan anggaran dalam melakukan peneraan dan penyuluhan hanya diperuntukkan untuk pasar tradisional, sehingga biaya operasional peneraan dan penyuluhan yang dilakukan di stasiun SPBU seluruhnya dibebankan kepada pengelola SPBU. Sebagaimana survey yang dilakukan Sukeski dkk (2014), menunjukkan biaya operasional tidak mencukupi biaya pelayanan maksimal karena rendahnya prioritas pemerintah daerah. Pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan kegiatan pelayanan tera/tera ulang karena kegiatan tersebut wajib dilaksanakan dalam rangka perlindungan konsumen, bukan sebagai sumber PAD. Keterbatasan anggaran juga mengakibatkan penyebaran informasi melalui komunikasi kelompok masih rendah, dari hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa bimbingan teknis kepada pengelola SPBU hanya sekali diadakan yakni di tahun 2012. Kemudian seminar sejenisnya baru diadakan lagi di tahun sekarang 2016, bertemakan perlindungan konsumen dalam konteks

kemetrologian. Penyebaran informasi melalui media massa juga masih rendah, ukuran stiker pemberitahuan yang ditempelkan pada pompa ukur BBM yang kecil, kualitasnya yang rendah dan tidak semua stiker diperbaharui dikarenakan keterbatasan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan hanya 2 (dua) SPBU yang dilekatkan stiker pemberitahuan yang terbaru, sedangkan 8 (delapan) SPBU lain menggunakan stiker lama, usang, dan terkelupas. Penyebaran informasi lewat media televisi, koran, radio, serta *facebook* baru berjalan ditahun 2016 berkaitan dengan pengawasan SPBU di Kota Makassar dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional.

Kurangnya upaya untuk mendapatkan informasi standardisasi pompa ukur BBM oleh pengelola SPBU terlihat dari pemahaman pengelola SPBU terhadap informasi standardisasi pompa ukur BBM masih rendah, pengelola SPBU memahami standardisasi pompa ukur BBM sebatas aturan yang wajib dilaksanakan agar terhindar dari sanksi baik dari instansi kemetrologian maupun dari Pertamina, namun kurang paham tentang informasi standardisasi pompa ukur BBM. Kondisi ini didasari karena mayoritas pengelola SPBU memiliki jenjang pendidikan bukan jurusan teknik, sehingga sangat sulit untuk memberikan pemahaman kepada mereka terkait metrologi yang merupakan bahasa

teknik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Wilson (2000), bahwa hambatan dalam hal bahasa ditemui dalam beberapa penelitian perilaku informasi. Semakin rendahnya pendidikan maka semakin rendah juga tingkat penguasaan pencarian informasi mereka. Demikian pula yang dikatakan oleh Notoatmojo (2003), bahwa Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang rendah akan menghambat perkembangan sikap seseorang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyebaran informasi standaridisasi pompa ukur BBM di Kota Makassar oleh instansi kemetrologian, maka disimpulkan bahwa eksistensi informasi standardisasi pompa ukur BBM dapat diketahui melalui medium (a) tanda tera dan Sertifikat hasil pengujian tera/tera ulang; (b) Plat yang melekat pada mesin pompa ukur BBM yang berisi informasi merk, tipe, no.seri, pembuat pompa ukur BBM dan nomor sertifikat persetujuan untuk ijin tipe; (c) Terdapat informasi jenis media yang diukur (dijual),

dan harga satuan/liter; (d) Pompa ukur BBM harus terpasang dengan kokoh pada pondasinya dan panel dalam keadaan terjamin keamanannya; (e) Pompa ukur BBM memiliki nomor pompa sesuai dengan konsol; (f) Jendela penutup tidak pecah atau rusak; (g) Gelas penglihat dalam keadaan bersih, berisi bola plastik dan terisi penuh dengan cairan; (h) Selang dalam kondisi baik, tidak pecah dan terkelupas; dan (i) Menampilkan semua elemen (eight tes) “888888” sebelum menampilkan angka nol. Penyebaran Informasi (Diseminasi) yang dilakukan oleh instansi kemetrolgian di Kota Makassar dilakukan melalui tiga saluran, yakni komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Hambatan-hambatan penyebaran informasi di Kota Makassar, yakni terbatasnya jumlah SDM kemetrolgian, minimnya anggaran pada instansi kemetrolgian di Kota Makassar, dan kurangnya upaya untuk mendapatkan informasi standarisasi pompa ukur BBM oleh pengelola SPBU. Oleh karena itu, Instansi Kemetrolgian dalam menyebarkan informasi standarisasi pompa ukur BBM agar semakin ditingkatkan dan terus dilakukan, merekrut SDM kemetrolgain, mengalokasikan dana secara khusus agar dapat memberi perlindungan kepada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansar. (2015). Warga Keluhkan Meteran Bensin di SPBU 74.905.03 Maros. Diakses 2 Februari 2016. Available from: <http://makassar.tribunnews.com>
- Barkatullah A. H. (2010). *Hak-hak konsumen*. Nusa Media, Bandung.
- Bhutto M. A. (2000). Telaah Kritis Atas Undang-undang Perlindungan Konsumen. Diakses 3 Maret 2016. Available from: <http://www.hukumonline.com>
- Cangara H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Kedua. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Liliweri A. (2011). *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Edisi I. Kencana, Jakarta
- Meyrowitz J. (2009). *Medium Theory: An Alternative to the Dominant Paradigm of Media Effects. The SAGE Handbook of media processes and effects*. SAGE, Los Angeles
- Mulyadi. (2014). *Meteran SPBU di Depan Pintu I Unhas Disebut Tak Pas*. (Online), (<http://makassar.tribunnews.com/2014/06/26/meteran-spbu-di-depan-pintu-i-unhas-disebut-tak-pas>, diakses tanggal 2 Februari 2016)
- Notoatmodjo S. (2003). *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineke Cipta, Jakarta
- Pawito. (2008). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LkiS Yogyakarta, Yogyakarta
- Sukesi H. dkk. (2014). *Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP*. Kementerian Perdagangan, Jakarta
- Wilson T. D. (2000). *Human Information Behaviour*. Information Science. Vol 3 No. 2, Diakses 24 Juni 2016, Available from: <http://inform.nu>